

Rehabilitasi dan Collaborative Governance dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Banjir Kabupaten Pidie Jaya

Zuliaden Jayus^{1✉}, Heri Fajri²

¹Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Ilmu Administrasi dan Ekonomi, Universitas Jabal Ghafur, Pidie, Indonesia

²Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jabal Ghafur, Pidie, Indonesia

*Email Korespodensi: zjayus@gmail.com^{1✉}, herifajriunigha@gmail.com²

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted 26-Juni-2026

Received 28-Juni-2026

Published 03-Juli-2026

Keywords:

rehabilitation;
collaborative gover;
economic recovery;
flood;
Pidie Jaya Regency;

Kata kunci:

rehabilitasi, tata kelola
kolaboratif, pemulihan
ekonomi, banjir, Kabupaten
Pidie Jaya.

ABSTRACT

Flooding in Pidie Jaya Regency has had significant impacts on the social and economic conditions of the community. Damage to infrastructure, disruption of trade activities, declining business productivity, and reduced household income have become major challenges in the post-disaster recovery process. In this context, rehabilitation focuses not only on physical reconstruction but also on restoring community economic activities through the involvement of multiple stakeholders. This study aims to analyze the implementation of rehabilitation programs and the role of collaborative governance in supporting post-flood economic recovery in Pidie Jaya Regency. The research employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and documentation studies involving local government officials, business actors, community organizations, and flood-affected residents. The findings indicate that economic rehabilitation was carried out through the restoration of economic infrastructure, the distribution of social and economic assistance, and the strengthening of community business capacities. Collaborative governance was reflected in the cooperation among local government, the private sector, community organizations, and local communities in planning, implementing, and evaluating recovery programs. Such collaboration accelerated economic recovery and enhanced public participation. However, challenges remain, including limited resources, suboptimal coordination among stakeholders, and issues related to program sustainability. Therefore, stronger synergy and collective commitment are essential to achieving a more effective, inclusive, and sustainable economic recovery.

ABSTRAK

Banjir yang terjadi di Kabupaten Pidie Jaya menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Kerusakan infrastruktur, terganggunya aktivitas perdagangan, menurunnya produktivitas usaha, serta berkurangnya pendapatan masyarakat menjadi tantangan utama dalam proses pemulihan pascabencana. Dalam konteks tersebut, rehabilitasi tidak hanya berfokus pada perbaikan

fisik, tetapi juga pada pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan rehabilitasi dan peran tata kelola kolaboratif dalam mendukung pemulihan ekonomi pascabanjir di Kabupaten Pidie Jaya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi yang melibatkan pemerintah daerah, pelaku usaha, organisasi masyarakat, serta masyarakat terdampak banjir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi ekonomi dilakukan melalui perbaikan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi, penyaluran bantuan sosial dan ekonomi, serta penguatan kapasitas usaha masyarakat terdampak. Tata kelola kolaboratif diwujudkan melalui kerja sama antara pemerintah daerah, sektor swasta, organisasi masyarakat, dan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program pemulihan. Kolaborasi tersebut mampu mempercepat proses pemulihan ekonomi dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Namun, masih terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya, koordinasi antaraktor yang belum optimal, serta keberlanjutan program yang memerlukan perhatian lebih. Oleh karena itu, penguatan sinergi dan komitmen bersama diperlukan untuk mewujudkan pemulihan ekonomi yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Bencana merupakan peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat akibat faktor alam, nonalam, maupun faktor manusia. Dampak bencana tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerusakan lingkungan, tetapi juga memengaruhi aspek sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Dalam konteks pembangunan daerah, bencana dapat menghambat pembangunan karena menyebabkan kerusakan infrastruktur, terganggunya pelayanan publik, menurunnya produktivitas ekonomi, serta meningkatnya kerentanan masyarakat. Oleh karena itu, penanggulangan bencana tidak hanya berfokus pada tahap tanggap darurat, tetapi juga mencakup rehabilitasi dan pemulihan pascabencana untuk mengembalikan kondisi masyarakat secara berkelanjutan.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat risiko bencana yang tinggi karena kondisi geografis, topografi, dan iklimnya. Salah satu bencana yang paling sering terjadi adalah banjir yang disebabkan oleh tingginya curah hujan, meluapnya sungai, serta dipengaruhi oleh aktivitas manusia seperti alih fungsi lahan, kerusakan hutan, dan buruknya sistem drainase.

Banjir tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Kerusakan lahan pertanian, terhambatnya perdagangan, menurunnya pendapatan pelaku usaha, dan terbatasnya akses terhadap sumber ekonomi menjadi dampak yang sering terjadi sehingga pemulihan ekonomi menjadi bagian penting dalam proses rehabilitasi pascabencana.

Pemulihan ekonomi pascabencana bertujuan mengembalikan aktivitas ekonomi masyarakat agar kembali produktif melalui perbaikan infrastruktur ekonomi, pemberian bantuan modal usaha, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia. Dengan demikian, rehabilitasi ekonomi tidak hanya berfungsi memulihkan kondisi masyarakat, tetapi juga meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana di masa mendatang.

Kabupaten Pidie Jaya merupakan salah satu wilayah di Provinsi Aceh yang memiliki kerentanan terhadap bencana banjir. Banjir yang terjadi secara berulang menyebabkan kerusakan lahan pertanian, terganggunya aktivitas perdagangan, rusaknya sarana ekonomi, serta menurunnya daya beli masyarakat. Mengingat sebagian besar masyarakat menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian, perikanan, perdagangan, dan usaha mikro, maka banjir memberikan dampak yang cukup besar terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, proses rehabilitasi ekonomi memerlukan strategi yang tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan, tetapi juga mampu membangun kembali aktivitas ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan modern, penyelesaian berbagai persoalan publik tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan adalah *collaborative governance*, yaitu tata kelola yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat, akademisi, media, dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan maupun pelaksanaan kebijakan publik. Menurut Ansell dan Gash (2008), *collaborative governance* dibangun melalui dialog, kepercayaan, komitmen bersama, serta partisipasi seluruh aktor dalam mencapai tujuan yang disepakati.

Dalam konteks pemulihan ekonomi pascabencana, *collaborative governance* menjadi pendekatan yang relevan karena proses rehabilitasi membutuhkan dukungan sumber daya, koordinasi, dan partisipasi berbagai pihak. Pemerintah berperan dalam penyusunan kebijakan dan penyediaan anggaran, sektor swasta mendukung melalui investasi dan bantuan ekonomi, organisasi masyarakat berperan dalam pemberdayaan masyarakat, sedangkan masyarakat menjadi subjek utama dalam pelaksanaan program pemulihan. Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) menjelaskan bahwa keberhasilan tata kelola kolaboratif dibangun melalui keterlibatan bersama (*principled engagement*), motivasi bersama (*shared motivation*), dan kapasitas untuk bertindak bersama (*capacity for joint action*).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *collaborative governance* mampu meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana dan pelaksanaan kebijakan publik. Namun,

sebagian besar penelitian lebih berfokus pada tahap mitigasi, tanggap darurat, atau rekonstruksi infrastruktur pascabencana. Penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi *collaborative governance* dalam rehabilitasi dan pemulihan ekonomi pascabanjir pada tingkat pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Pidie Jaya, masih relatif terbatas. Selain itu, hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas kolaborasi dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, koordinasi antaraktor, dan karakteristik lokal sehingga masih diperlukan kajian yang lebih mendalam.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis implementasi *collaborative governance* dalam rehabilitasi dan pemulihan ekonomi pascabanjir di Kabupaten Pidie Jaya dengan menggunakan perspektif Ansell dan Gash (2008) serta Emerson et al. (2012). Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi bentuk kolaborasi antar pemangku kepentingan, tetapi juga menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi kolaborasi serta kontribusinya terhadap pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan rehabilitasi dan penerapan *collaborative governance* dalam pemulihan ekonomi pascabanjir di Kabupaten Pidie Jaya serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasinya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian *collaborative governance* dalam administrasi publik serta menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan rehabilitasi ekonomi yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses rehabilitasi dan penerapan *collaborative governance* dalam pemulihan ekonomi pasca banjir di Kabupaten Pidie Jaya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai interaksi antaraktor, mekanisme kolaborasi, serta berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam proses pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana.

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, yang merupakan salah satu wilayah yang mengalami dampak banjir dan melaksanakan berbagai program rehabilitasi ekonomi pascabencana. Fokus penelitian diarahkan pada pelaksanaan rehabilitasi ekonomi dan bentuk kolaborasi yang melibatkan pemerintah daerah, sektor swasta, organisasi masyarakat, serta masyarakat terdampak banjir.

Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam proses rehabilitasi dan pemulihan ekonomi pascabanjir. Informan penelitian terdiri atas pejabat pemerintah daerah, Badan Penanggulangan

Bencana Daerah, Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, aparatur kecamatan, tokoh masyarakat, pelaku usaha, organisasi masyarakat, serta masyarakat yang terdampak banjir.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan rehabilitasi ekonomi, pola koordinasi antaraktor, bentuk partisipasi pemangku kepentingan, serta kendala yang dihadapi dalam proses pemulihan. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi lapangan, aktivitas ekonomi masyarakat, serta implementasi program rehabilitasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dan pihak terkait. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen, laporan kegiatan, peraturan, data statistik, foto kegiatan, dan arsip lain yang relevan dengan penelitian.

Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan triangulasi waktu dilakukan melalui pengumpulan data pada waktu yang berbeda guna memastikan konsistensi informasi yang diperoleh. Selain itu, peneliti juga melakukan *member checking* kepada beberapa informan untuk memastikan kesesuaian hasil interpretasi data dengan kondisi yang sebenarnya.

Reliabilitas penelitian dijaga melalui konsistensi proses pengumpulan dan analisis data. Peneliti mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara sistematis melalui catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumentasi kegiatan, serta penyimpanan data penelitian secara terorganisasi. Langkah tersebut dilakukan agar proses penelitian dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan secara akademik.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi tiga tahapan utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih, menyederhanakan, dan mengelompokkan data yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif sehingga memudahkan peneliti memahami pola hubungan antarvariabel dan antaraktor yang terlibat. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan melalui proses interpretasi terhadap temuan penelitian yang didukung oleh data empiris di lapangan. Proses analisis dilakukan secara berulang sejak awal pengumpulan data hingga penelitian selesai sehingga menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kerangka analisis penelitian mengacu pada teori *Collaborative Governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008) serta Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012). Analisis difokuskan pada aspek partisipasi pemangku kepentingan, dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses kolaborasi, pemahaman bersama, dan hasil kolaborasi dalam mendukung pemulihan ekonomi masyarakat pasca banjir di Kabupaten Pidie Jaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Pemulihan Ekonomi Pascabanjir di Kabupaten Pidie Jaya

Banjir yang terjadi di Kabupaten Pidie Jaya memberikan dampak yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, sektor yang paling terdampak meliputi pertanian, perdagangan, usaha mikro, serta aktivitas ekonomi rumah tangga. Kerusakan infrastruktur jalan dan fasilitas pendukung ekonomi menyebabkan terganggunya distribusi barang dan jasa sehingga aktivitas perdagangan mengalami penurunan. Selain itu, sejumlah lahan pertanian mengalami kerusakan akibat genangan air yang mengakibatkan penurunan hasil produksi dan pendapatan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya melakukan berbagai upaya rehabilitasi ekonomi melalui perbaikan infrastruktur dasar, pemberian bantuan sosial dan ekonomi, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro. Program rehabilitasi dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan dan kebutuhan masyarakat terdampak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya rehabilitasi tersebut mampu membantu masyarakat dalam memulai kembali aktivitas ekonomi yang sempat terhenti akibat bencana banjir.

Meskipun demikian, proses pemulihan ekonomi tidak berlangsung secara instan. Sebagian masyarakat masih menghadapi keterbatasan modal usaha, rendahnya daya beli masyarakat, dan terbatasnya akses pasar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi pascabencana memerlukan waktu yang relatif panjang dan membutuhkan dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak.

Tabel 1. Dampak Banjir terhadap Aktivitas Ekonomi Masyarakat

Sektor	Dampak yang Dirasakan
Pertanian	Kerusakan lahan dan gagal panen
Perdagangan	Penurunan aktivitas jual beli
Usaha Mikro	Berkurangnya modal usaha
Transportasi	Terganggunya distribusi barang
Rumah Tangga	Menurunnya pendapatan keluarga

Keterlibatan Aktor dalam Collaborative Governance

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses rehabilitasi ekonomi pascabanjir di Kabupaten Pidie Jaya melibatkan berbagai aktor yang berasal dari sektor publik, sektor swasta, organisasi masyarakat, dan masyarakat terdampak. Pemerintah daerah berperan sebagai koordinator utama dalam penyusunan program rehabilitasi dan pengalokasian sumber daya. Selain itu, beberapa organisasi masyarakat turut berpartisipasi dalam penyaluran bantuan dan pendampingan masyarakat terdampak.

Keterlibatan sektor swasta terlihat melalui pemberian bantuan sosial, dukungan terhadap usaha mikro, serta partisipasi dalam kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Sementara itu,

masyarakat berperan sebagai penerima manfaat sekaligus mitra dalam pelaksanaan berbagai program pemulihan ekonomi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan berbagai aktor tersebut mencerminkan praktik collaborative governance yang menempatkan berbagai pemangku kepentingan dalam satu proses kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Ansell dan Gash (2008) yang menyatakan bahwa keberhasilan tata kelola kolaboratif ditentukan oleh partisipasi aktif berbagai aktor dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik.

Dialog dan Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan

Salah satu indikator penting dalam collaborative governance adalah adanya dialog dan komunikasi yang intensif antaraktor. Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah daerah secara rutin melakukan koordinasi dengan instansi terkait, pemerintah kecamatan, organisasi masyarakat, dan tokoh masyarakat dalam merumuskan langkah-langkah rehabilitasi ekonomi.

Forum koordinasi menjadi sarana untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menentukan prioritas program, dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul selama proses rehabilitasi. Melalui dialog tersebut, berbagai pihak dapat menyampaikan pandangan, kebutuhan, serta usulan yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi masyarakat.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa koordinasi belum sepenuhnya berjalan optimal. Masih ditemukan keterlambatan penyampaian informasi serta perbedaan persepsi antarinstansi dalam pelaksanaan program tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif masih menjadi tantangan dalam implementasi collaborative governance di tingkat daerah.

Dalam perspektif Emerson et al. (2012), dialog yang berkelanjutan merupakan bagian dari dinamika kolaborasi yang mampu membangun pemahaman bersama dan meningkatkan efektivitas kerja sama antaraktor. Oleh karena itu, peningkatan kualitas komunikasi dan koordinasi menjadi kebutuhan penting dalam memperkuat tata kelola kolaboratif pada masa mendatang.

Membangun Kepercayaan dan Komitmen Bersama

Kepercayaan merupakan faktor penting yang memengaruhi keberhasilan collaborative governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat secara umum berjalan cukup baik. Masyarakat menunjukkan kepercayaan terhadap program rehabilitasi yang dilaksanakan pemerintah karena adanya keterbukaan informasi dan keterlibatan masyarakat dalam beberapa tahapan kegiatan.

Selain kepercayaan, komitmen para aktor juga menjadi faktor yang menentukan keberhasilan pemulihan ekonomi pascabencana. Pemerintah daerah menunjukkan komitmen melalui penyediaan anggaran dan pelaksanaan berbagai program rehabilitasi. Organisasi masyarakat menunjukkan komitmen melalui pendampingan masyarakat dan pelaksanaan kegiatan sosial. Sementara itu, masyarakat menunjukkan komitmen dengan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan pemulihan ekonomi.

Temuan ini memperkuat teori Ansell dan Gash (2008) yang menyatakan bahwa kepercayaan dan komitmen merupakan fondasi utama dalam membangun kolaborasi yang berkelanjutan. Tanpa adanya kepercayaan dan komitmen, kolaborasi akan sulit mencapai tujuan yang diharapkan.

Hasil Kolaborasi dalam Pemulihan Ekonomi Pascabanjir

Pelaksanaan collaborative governance memberikan sejumlah dampak positif terhadap proses pemulihan ekonomi masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kembali aktivitas perdagangan, membaiknya kondisi usaha mikro, serta pulihnya sebagian besar kegiatan ekonomi masyarakat setelah berbagai program rehabilitasi dilaksanakan.

Kolaborasi antaraktor juga menghasilkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya karena berbagai pihak dapat saling melengkapi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah secara mandiri. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pemulihan meningkatkan rasa memiliki terhadap program yang dilaksanakan sehingga mendorong keberlanjutan hasil rehabilitasi.

Dari perspektif teori collaborative governance, hasil tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi mampu menciptakan nilai publik (*public value*) melalui pemanfaatan sumber daya secara bersama-sama. Keberhasilan ini juga mendukung konsep *Build Back Better* yang menekankan pentingnya membangun kembali kondisi masyarakat secara lebih baik dan lebih tangguh dibandingkan sebelum bencana terjadi.

Faktor Pendukung dan Penghambat Collaborative Governance

Hasil penelitian menemukan beberapa faktor pendukung keberhasilan collaborative governance dalam pemulihan ekonomi pascabanjir di Kabupaten Pidie Jaya. Faktor-faktor tersebut meliputi adanya dukungan pemerintah daerah, partisipasi masyarakat yang cukup tinggi, keberadaan modal sosial masyarakat, serta komitmen para pemangku kepentingan dalam mendukung program rehabilitasi.

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas kolaborasi. Faktor tersebut antara lain keterbatasan anggaran, belum optimalnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia, serta perbedaan kepentingan di antara beberapa aktor yang terlibat. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang belum memperoleh akses yang merata terhadap program bantuan ekonomi sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda terhadap efektivitas program rehabilitasi.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan collaborative governance tidak hanya ditentukan oleh keterlibatan banyak aktor, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, kualitas komunikasi, dan kemampuan para pihak dalam membangun hubungan kerja sama yang berkelanjutan.

Analisis Collaborative Governance dalam Pemulihan Ekonomi Pascabanjir

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan collaborative governance dalam pemulihan ekonomi pasca banjir di Kabupaten Pidie Jaya telah menunjukkan karakteristik utama sebagaimana dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008), yaitu adanya partisipasi berbagai pemangku kepentingan, dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, serta pencapaian hasil bersama. Meskipun demikian, implementasi kolaborasi masih memerlukan penguatan terutama dalam aspek koordinasi, integrasi program, dan keberlanjutan kerja sama antaraktor.

Dari perspektif Emerson et al. (2012), dinamika kolaborasi yang terjadi menunjukkan adanya keterlibatan bersama (*principled engagement*), motivasi bersama (*shared motivation*), dan kapasitas untuk bertindak bersama (*capacity for joint action*). Ketiga unsur tersebut menjadi faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance memiliki peran yang signifikan dalam mendukung rehabilitasi dan pemulihan ekonomi pasca banjir di Kabupaten Pidie Jaya. Kolaborasi yang efektif mampu mempercepat proses pemulihan ekonomi, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memperkuat ketahanan sosial ekonomi masyarakat dalam menghadapi risiko bencana di masa yang akan datang.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi ekonomi pasca banjir di Kabupaten Pidie Jaya telah dilaksanakan melalui berbagai program yang mencakup perbaikan infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi, pemberian bantuan kepada masyarakat terdampak, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro dan sektor ekonomi produktif lainnya. Upaya tersebut bertujuan untuk mengembalikan kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan akibat dampak banjir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemulihan ekonomi tidak hanya bergantung pada intervensi pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan dalam suatu mekanisme kerja sama yang terintegrasi.

Penerapan *collaborative governance* dalam pemulihan ekonomi pascabanjir di Kabupaten Pidie Jaya terlihat melalui keterlibatan pemerintah daerah, organisasi masyarakat, sektor swasta, tokoh masyarakat, dan masyarakat terdampak dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program rehabilitasi. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui forum koordinasi, dialog antaraktor, pertukaran informasi, dan pembagian peran sesuai dengan kapasitas masing-masing pihak. Keberadaan kolaborasi tersebut mampu mendukung percepatan pemulihan ekonomi masyarakat karena berbagai sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing aktor dapat dimanfaatkan secara bersama untuk mencapai tujuan yang sama.

Penelitian ini juga menemukan bahwa keberhasilan *collaborative governance* dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain komitmen pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, keberadaan modal sosial yang kuat, serta adanya kesamaan tujuan di antara para

pemangku kepentingan. Di sisi lain, pelaksanaan kolaborasi masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan anggaran, belum optimalnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia, dan perbedaan kepentingan yang muncul dalam proses implementasi program. Meskipun demikian, secara umum penerapan *collaborative governance* telah memberikan kontribusi positif terhadap proses rehabilitasi dan pemulihan ekonomi masyarakat pasca banjir di Kabupaten Pidie Jaya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan *collaborative governance* merupakan strategi yang relevan dan efektif dalam mendukung pemulihan ekonomi pascabencana. Melalui kolaborasi yang terencana dan berkelanjutan, pemerintah dan para pemangku kepentingan dapat memperkuat ketahanan sosial ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana pada masa yang akan datang.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk memperkuat mekanisme koordinasi antarorganisasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya melalui forum kolaborasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Pemerintah juga perlu meningkatkan kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, serta sistem komunikasi dan pertukaran informasi agar pelaksanaan program rehabilitasi ekonomi dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Selain itu, partisipasi masyarakat perlu terus diperkuat melaluielibatan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pemulihan ekonomi. Penguatan usaha mikro, peningkatan akses permodalan, pengembangan keterampilan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi digital juga perlu menjadi perhatian dalam rangka menciptakan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian mengenai *collaborative governance* dalam penanggulangan bencana dengan menggunakan pendekatan yang lebih luas, baik melalui penelitian komparatif antarwilayah maupun pendekatan campuran sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas tata kelola kolaboratif dalam pemulihan pascabencana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agranoff, R., & McGuire, M. (2003). *Collaborative Public Management: New Strategies for Local Governments*. Washington, DC: Georgetown University Press.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). *Collaborative Governance Regimes*. Washington, DC: Georgetown University Press.
- Folke, C., Biggs, R., Norström, A. V., Reyers, B., & Rockström, J. (2016). *Social-Ecological Resilience and Biosphere-Based Sustainability Science*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Koppenjan, J., & Klijn, E. H. (2016). *Governance Networks in the Public Sector*. London: Routledge.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, D. (2018). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ndraha, T. (2015). *Kybernology: Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2017). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sutopo, H. B. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.
- Tachjan. (2016). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.